

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran umum objek penelitian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang sekarang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapatnya sejumlah 34 Provinsi yang ada di seluruh Negara Indonesia (indonesia.go.id/province).

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Seiring dengan adanya pertanggungjawaban pelaksanaan tersebut, sehingga terdapat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang menjelaskan tentang keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Salah satu tujuan undang-undang tersebut yaitu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Maka setiap informasinya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik yang dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

PP nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), mengatakan bahwa Penyajian informasi keuangan daerah yang disampaikan melalui situs resmi pemerintah daerah harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Penyampaian informasi keuangan internet merupakan cara yang murah dan efektif (*cost effective*) bagi pemda untuk menyajikan informasi tentang pengelolaan keuangan, namun pemanfaatannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum secara maksimal (Styles & Tennyson 2007 dalam Wau & Ratmono 2015). Menurut penelitian Prima & Verawaty (2018) menjelaskan bahwa 34 provinsi yang ada di Indonesia terdapat pemerintah daerah yang belum memaksimalkan penggunaan website resmi mereka guna memberikan informasi kepada masyarakatnya terkait dengan daerahnya masing-masing.

1.2 Latar belakang penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Maka menurut penelitian Wau & Ratmono (2015) sebagai indikator pelayanan publik yang baik, maka pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan semua penggunaan sumber daya kepada masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab dan transparansi pemerintah kepada masyarakat yaitu dengan menyampaikan informasi penggunaan sumber-sumber daya dalam bentuk informasi laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keterbukaan informasi publik pun tercantum didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, setiap informasi yang dapat diakses secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana yang dapat dipahami dalam menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Pengguna yang dimaksud dapat diartikan sebagai masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah.

Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan penting untuk dilakukan dikarenakan akan menggambarkan tentang perbedaan praktik pengungkapan yang telah dilakukan oleh entitas pemerintah daerah, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta menggambarkan kondisi pemerintah daerah tersebut pada periode pelaporan. Selain itu, pengungkapan juga adalah faktor penting sebagai pencapaian efisiensi dan sebagai sarana akuntabilitas (Pandansari, 2016). Menurut penelitian Hasanah (2016) internet merupakan salah satu solusi bagi pemerintah daerah dalam melakukan transparansi laporan keuangan pemerintahan kepada masyarakat luas, karena dengan menggunakan internet maka biaya yang dikeluarkan akan lebih ekonomis.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan output dari suatu sistem akuntansi yang tidak terlepas dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan yang terjadi yaitu penyajian LKPD pada tahap publikasi LKPD secara luas kepada masyarakat masih menjadi upaya yang harus dibenahkan. Andi Chairil Furqan menguraikan beberapa penyebab belum efektifnya transformasi akuntansi sektor publik di Indonesia, salah satunya yaitu penyajian laporan keuangan pemerintah di Indonesia belum dapat berkontribusi maksimal dalam rangka mengurangi korupsi dan kolusi, meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Publikasi yang dilakukan pemerintah daerah harus berkomitmen untuk setiap saat atau secara berkala serta mempublikasikan LKPD kepada masyarakat harus menggunakan media yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut dengan sendirinya dapat mendorong perwujudan akuntabilitas publik, dikarenakan dengan dipublikasikannya LKPD maka membuka peluang bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi melakukan penilaian sekaligus pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah, sehingga dapat memotivasi seluruh pihak terkait untuk berbuat yang terbaik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kompasiana.com). Hasil survey IPK (Indeks Persepsi Korupsi) Indonesia 2017

menunjukkan bahwa tingkat korupsi mempunyai rata-rata 60,8 dalam skala 0-100, skor IPK pada tahun 2017 tersebut menunjukkan skor diatas rata-rata. Terkait persepsi publik terhadap korupsi sektor publik belum menunjukkan perubahan signifikan. Sehingga masih adanya persepsi penyyuapan atau korupsi oleh responden masih tinggi. Maka dari itu diperlukannya masyarakat melakukan pemantauan terhadap anti korupsi sebagai dasar penilaian akuntabilitas publik secara aktif dan konstruktif. Pemantauan yang bisa dilakukan yaitu dengan cara mengamati pengungkapan informasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Penelitian terkait dengan pengungkapan laporan keuangan belum banyak dilakukan oleh laporan keuangan pemerintahan dibandingkan perusahaan, salah satunya disebabkan karena terbatasnya informasi pemerintah yang dapat diakses publik dan sulitnya mengembangkan motif yang mendasari pengungkapan (Hendriyani & Tahar, 2015). Oleh sebab itu, banyak pemerintah daerah yang masih pasif dalam melakukan pengungkapan informasi mengenai daerahnya masing-masing (Khasanah, 2016). Pemerintah daerah yang buruk akan menghindari pengungkapan informasi keuangan dan akan memilih untuk membatasi pengungkapan informasi bagi masyarakat (Verawaty, 2015). Sedangkan menurut Ott et al (2017) dalam penelitian Alwahidi & Darwanis (2019) menyatakan bahwa dengan menerbitkan informasi anggaran secara berkala akan memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi secara efisien dalam pengawasan pengelolaan dana publik, sehingga apabila pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah masih tergolong rendah maka hal tersebut akan berdampak pada tingginya angka korupsi yang terjadi dikarenakan rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat akibat dari sedikitnya informasi yang disampaikan pemerintah di *websitenya*. Serta terdapatnya kekurangan yang dijelaskan dalam penelitian Prasasti et al (2017) bahwa salah satu item yang masih belum diungkapkan dalam situs resmi yaitu berupa satu set Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tidak *up to date*, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa masih tingginya keterbatasan informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)

yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih enggan melakukan keterbukaan informasi publik.

Terdapat 7 laporan keuangan pokok daerah (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua) yaitu : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Maka menurut penelitian Idris et al (2018) mengungkapkan bahwa publikasi pemerintah daerah laporan keuangan via internet dapat diukur menggunakan angka dummy. Dianggap mengungkapkan dengan memberi angka 1 diberikan jika dalam *website* daerah tersebut menghadirkan satu atau lebih komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam *websitenya* dan angka 0 diberikan jika dalam *website* daerah tersebut tidak menghadirkan sama sekali komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam *websitenya*. Dalam penelitian ini terdapat 3 faktor yang diduga mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi yaitu kompleksitas pemerintah, tingkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Faktor pertama dalam pengungkapan laporan keuangan adalah kompleksitas pemerintah. Menurut penelitian Khasanah (2014) dalam Rahayu & Mardiana (2016) kompleksitas adalah kondisi dan beragamnya faktor-faktor yang ada di lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Maka kompleksitas dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat beragam faktor dengan karakteristik berbeda-beda yang mempengaruhi pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jumlah Penduduk merupakan sebuah pengukuran yang menggambarkan kompleksitas suatu daerah (Hendriyani & Tahar, 2015). Definisi penduduk menurut Lembaga Badan Pusat Statistik (BPS) adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan peraturan pemerintah (No.6/1960; No.7/1960) sumber utama kependudukan yaitu dengan dilakukannya

sensus penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan dapat diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi (Naopal et al 2017). Hasil penelitian yang dilakukan Hendriyani & Tahar (2015) menyatakan bahwa jumlah penduduk terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dan hasil penelitiannya mendukung UU No 33 Tahun 2004 pasal 28 bahwa besarnya penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan akan penyediaan pelayanan publik disetiap daerah. Maka semakin tinggi jumlah penduduk suatu daerah maka semakin kompleks pemerintahan tersebut sehingga semakin tinggi pula pengungkapan informasi yang harus dilakukan. Akan tetapi berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang Nurtari et al (2016) menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah di Provinsi Jawa Barat, karena jumlah penduduk tidak serta mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan pengungkapannya.

Faktor selanjutnya dalam pengungkapan laporan keuangan yaitu tingkat kemandirian daerah. Tingkat kemandirian daerah menurut penelitian Prasasti et al (2017) adalah kemampuan sebuah daerah untuk melaksanakan pemerintahannya. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan wujud kemandirian dalam memperoleh pendapatan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan menggunakan mekanisme APBD (Verawaty 2017). Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari rasio kemandirian keuangan daerah dengan cara jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan daerah (TPD) yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah (Prasasti et al, 2017). Dari hasil rasio keuangan daerah maka akan adanya interpretasi skala interval rasio kemandirian keuangan daerah yang dapat dikategorikan dari pola instruktif yang rendah sekali sampe dengan pola delegatif dimana pemerintah daerah sudah sangat mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Penjelasan yang berada di UU No. 32 Tahun 2004, mengatakan sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak

daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pemerintah asli daerah yang sah. Suatu daerah dikatakan mandiri jika menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007 dalam Rahayu & Mardiana, 2016).

Terdapatnya fenomena yang terjadi dari hasil observasi rasio kemandirian dengan pengungkapan *website* resmi pemerintah daerah di seluruh provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2017. Data observasi yang diteliti berupa rasio kemandirian yaitu dengan cara PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah, data tersebut diperoleh dari *website* Kementerian Keuangan (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>) sedangkan data pengungkapan laporan keuangan diperoleh dari masing-masing *website* resmi provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Diukur dengan variabel dummy (angka 1 jika pemerintah daerah itu menyajikan salah satu komponen dari laporan keuangan dan angka 0 diberikan kepada daerah pemerintah yang tidak menghadirkan sama sekali komponen laporan keuangan). Hasil observasi menunjukkan bahwa dari 34 provinsi yang ada di Indonesia hanya 15 Provinsi yang mengungkapkan salah satu komponen dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada *website* resminya. Kemudian terlihat bahwa Provinsi Maluku memiliki rasio kemandirian 7%, dapat dikategorikan sebagai pola hubungan yang instruktif yaitu kemandirian keuangan daerah yang rendah sekali, tetapi provinsi tersebut lebih baik karena mengungkapkan komponen laporan keuangan dalam *websitenya*. Sedangkan Provinsi D.I Yogyakarta yang memiliki rasio kemandirian sebesar 30 % yang dikategorikan sebagai pola hubungan konsultatif yaitu kemandirian keuangan daerah yang rendah, malah tidak mengungkapkan salah satu pun laporan keuangan yang ada di *website* resminya.

Tabel 1. 1

Perbandingan Tingkat Kemandirian dengan Pengungkapan Informasi Keuangan pada Website Resmi Pemda pada tahun 2017

Pemerintah Daerah	Tingkat Kemandirian	Pengungkapan Informasi Keuangan
Provinsi Maluku	7 %	1
Provinsi D.I Yogyakarta	30 %	0

Sumber : Hasil olah data 2019

Hal tersebut tidak sejalan dengan pernyataan penelitian Nurtari et al (2016) dan Hasanah (2016) bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, maka memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingginya pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah melakukan tanggungjawabnya dengan baik dan masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah disuatu daerah tersebut. Akan tetapi, hasil penelitian Prasasti et all (2017) dan Wau & Ratmono (2015) bahwa tingkat kemandirian tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian Hendriyani & Tahar (2015) yang mengatakan bahwa tingkat kemandirian tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, karena tingginya tingkat kekayaan suatu daerah tidak akan mencerminkan pengungkapan informasi yang tinggi pula.

Faktor terakhir dalam penelitian ini untuk pengungkapan laporan keuangan yaitu kesejahteraan masyarakat. Menurut Yustikasari (2018) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu kepala daerah harus dapat mengupayakan terciptanya keseimbangan antara kemampuan memperoleh pendapatan dengan pengeluaran guna memenuhi kebutuhan rakyat yang jumlahnya tidak terbatas sehingga tujuan dari pemerintah akan terlaksana. Kesejahteraan dapat digambarkan dengan pendapatan perkapita, hal tersebut dikarenakan dengan masyarakat yang produktif maka pendapatan perkapita masyarakat pun akan lebih tinggi (Hasanah, 2016). Hal itu dapat digunakan sebagai ukuran dari tingkat produktivitas masyarakat (Wau & Ratmono,2015). Pendapatan per kapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk yang ada disuatu daerah

(Priyastiwi & Saputra, 2018). Daerah yang memiliki masyarakat dengan pendapatan besar akan memiliki tingkat pengawasan politik yang tinggi oleh masyarakat, maka akan meningkatkan permintaan atas informasi kinerja pemerintah (Styles & Tennyson, 2007 dalam Wau & Ratmono, 2015). Sehingga semakin sejahtera masyarakat maka pemerintah daerah akan terdorong untuk mempublikasikan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah (Idris et al, 2018). Proksi yang digunakan dalam pengukuran variabel tingkat kesejahteraan daerah adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perkapita digunakan untuk menentukan pendapatan perkapita penduduk, yang dapat dilihat di PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (Verawaty, 2015)

Penelitian Idris et al (2018) sejalan dengan hasil penelitian Hasanah (2016) yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Dikarenakan semakin tinggi kesejahteraan disuatu daerah baik maka pola pikir masyarakat tersebut cenderung lebih maju, situasi ini akan mendorong tingginya pemerintah untuk melakukan publikasi informasi keuangan pemda melalui internet. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Yustikasari (2018) menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka penulis memutuskan perlu meneliti lebih jauh lagi dengan mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompleksitas Pemerintah, Tingkat Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Pada *Website* Resmi Pemerintah Daerah (Studi pada Laporan Keuangan Seluruh Ibu Kota Provinsi di Indonesia Periode 2016-2017) “.**

1.3 Perumusan masalah

Dalam mewujudkan transparansi pemerintah daerah maka terdapatnya keterbukaan informasi publik berupa *website* resmi Pemerintah Daerah di setiap Provinsi di Indonesia yang dapat digunakan oleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Salah tujuan

diadakan keterbukaan informasi sebagai sarana dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang tersedia dalam situs resmi terdiri dari profil umum daerah, kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah, peraturan daerah, hingga informasi keuangan. PP nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), mengatakan bahwa Penyajian informasi keuangan daerah yang disampaikan melalui situs resmi pemerintah daerah harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, terdapat beberapa provinsi yang pengungkapan informasi keuangan yang disajikan ternyata belum optimal.

Provinsi yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, maka akan melakukan pengungkapan informasi keuangan yang dilakukan provinsi tersebut akan tinggi juga. Akan tetapi hasil observasi pengungkapan laporan keuangan dalam *website* masing-masing pemerintah daerah se Ibu Kota Provinsi pada tahun 2017, memperlihatkan bahwa provinsi Maluku yang dikategorikan kemandirian keuangan daerah yang rendah sekali (pola instruktif), memiliki pengungkapan yang lebih baik karena provinsi tersebut mengungkapkan komponen laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dalam *websitenya*. Sedangkan Provinsi D.I Yogyakarta yang dikategorikan sebagai kemandirian keuangan daerah yang rendah (pola konsultatif), malah tidak mengungkapkan salah satu pun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di dalam *website* resminya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini:

- 1) Bagaimana kompleksitas pemerintah, tingkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah diseluruh ibu kota provinsi di Indonesia tahun 2016 – 2017?
- 2) Bagaimana pengaruh kompleksitas pemerintah, tingkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara simultan terhadap pengungkapan informasi

keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah diseluruh ibu kota provinsi di Indonesia tahun 2016 – 2017?

- 3) Bagaimana pengaruh secara parsial :
 - a. Pengaruh kompleksitas pemerintah secara parsial terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah diseluruh ibu kota provinsi di Indonesia tahun 2016-2017?
 - b. Pengaruh tingkat kemandirian secara parsial terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah diseluruh ibu kota provinsi di Indonesia tahun 2016-2017?
 - c. Pengaruh kesejahteraan masyarakat secara parsial terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah diseluruh ibu kota provinsi di Indonesia tahun 2016-2017?

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui kompleksitas pemerintah, tingkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah diseluruh ibu kota provinsi di Indonesia tahun 2016-2017
- 2) Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas pemerintah, tingkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara simultan terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah diseluruh ibu kota provinsi di Indonesia tahun 2016-2017.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial :
 - a. Pengaruh kompleksitas pemerintah secara parsial terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah diseluruh ibu kota provinsi di Indonesia tahun 2016-2017.
 - b. Pengaruh tingkat kemandirian secara parsial terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah diseluruh ibu kota provinsi di Indonesia tahun 2016-2017.

- c. Pengaruh kesejahteraan masyarakat secara parsial terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah diseluruh ibu kota provinsi di Indonesia tahun 2016-2017.

1.5 Manfaat penelitian

1.5.1 Secara Teoritis

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dalam pengetahuan tentang pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah.
2. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca, mengenai pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah yang ada diseluruh ibu kota provinsi di Indonesia.
3. Penelitian ini bisa sebagai bahan referensi dan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian dengan topik yang sama yaitu pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah sebagai bahan penelitian.

1.5.2 Secara Praktis

1. Untuk pemerintah daerah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi timbal balik untuk perkembangan daerahnya serta dapat memotivasi pemerintah daerah lain untuk mengembangkan *website* resminya dalam rangka penyampaian informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti investor dan masyarakat.
2. Untuk Publik
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang pelaporan informasi keuangan yang dapat diakses pada *website* resmi pemerintahan daerah.

1.8 Sistematika penulisan tugas akhir

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami materi yang terdapat dalam penelitian ini. Maka sistematika penelitian secara garis besar disusun mejadi 5 bab, sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan secara singkat tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang berisikan suatu fenomena yang penting, perumusan masalah yang berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan melakukan penelitian, manfaat penelitian dari segi teoritis maupun praktis, serta terdapat sistematika penulisan tugas akhir yang menjelaskan secara ringkas isi masing-masing bab.

b. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan hasil kajian kepustakaan serta uraian umum berupa landasan teori dengan literatur yang berkaitan dengan pengungkapan informasi keuangan, kompleksitas pemerintah, tingkat kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat dijadikan kerangka pemikiran, terdapatnya penelitian terdahulu dari jurnal nasional maupun international, kerangka pemikiran penelitian, dan diakhiri dengan hipotesis penelitian.

c. BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan penjelasan meliputi jenis penelitian, operasional variabel yang berupa independen maupun dependen, tahapan penelitian, populasi, sampel, pengumpulan data serta sumber data, teknik analisis data untuk pengujian hipotesis yang digunakan dalam menjawab dan menjelaskan masalah penelitian.

d. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dari data yang telah dikumpulkan, maka adanya pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian yang disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian, sedangkan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil

analisis data, kemudian diinterpretasikan dan langkah selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teori yang relevan.

e. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang diperoleh sehingga terdapatnya jawaban dari masalah yang diangkat serta terdapatnya saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya maupun para pembaca.